

BAB III

ANALISIS PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG

3.1 Analisis Strategi dan Kebijakan Penataan Ruang Metropolitan Bandung

Uraian pada sub bab ini ditujukan untuk mereview beberapa studi tentang kebijakan struktur ruang Metropolitan Bandung. Hasil review tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pada akhir 1978, secara sektoral disusun suatu dokumen rencana jangka panjang berikut kajian kelayakannya, yang disebut sebagai Bandung Urban Development and Sanitation Project (BUDS). Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk menjadi dasar pemberian pinjaman oleh ADB dan APBN. Pinjaman tersebut diluncurkan pertama kali untuk periode tahun 1979–1987 yang disebut BUDP I dan dilanjutkan dengan BUDP II untuk periode tahun 1986-1994. BUDP I mencakup sektor Perbaikan Kampung (KIP), drainase, air kotor, manajemen persampahan, penyediaan rumah inti, dan Kasiba. Sedangkan BUDP II, tetap melanjutkan sektor KIP, drainase, air kotor, dan manajemen persampahan, dan mulai melakukan penanganan pengendalian banjir, serta pembangunan prasarana kota-kota kecil sekitar Bandung.

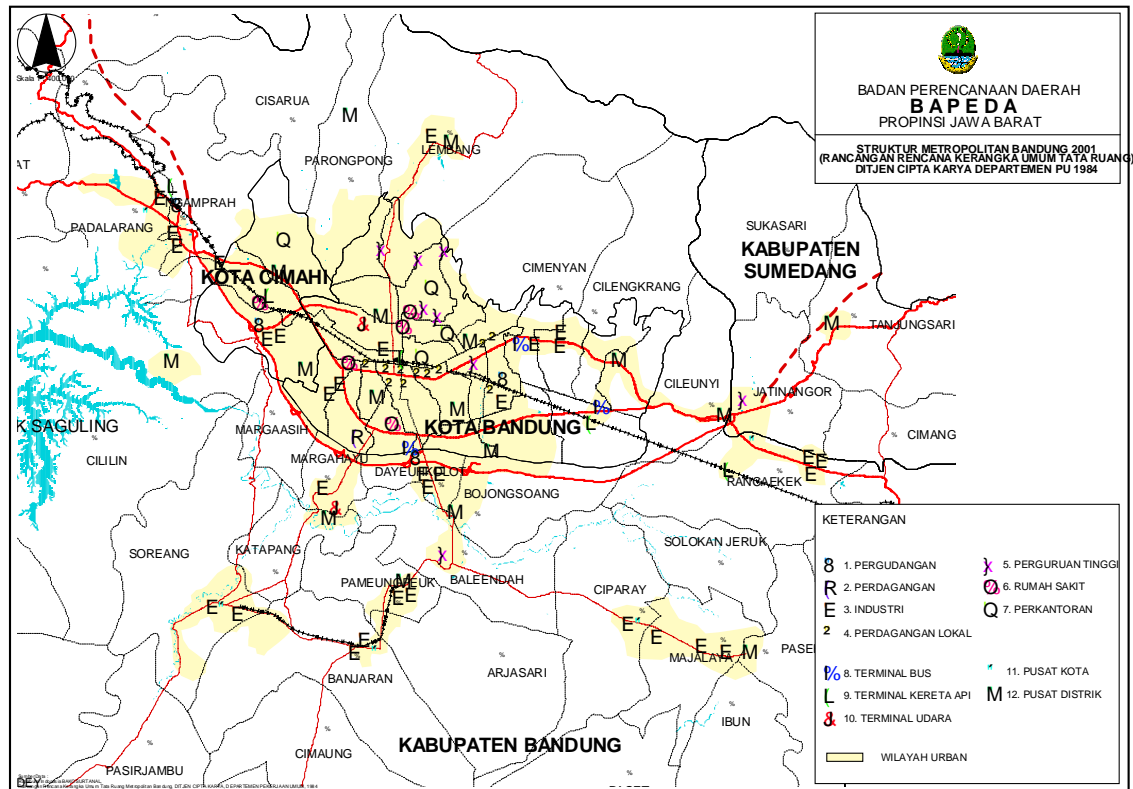
Selanjutnya, pada tahun 1984 Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum merasakan pentingnya suatu struktur Metropolitan Bandung yang *efisien, efektif, dan dinamis*, sehingga pada tahun tersebut disusun suatu Rencana Kerangka Umum Tata Ruang (RKUTR) Metropolitan Bandung. Pembentukan struktur Metropolitan Bandung yang disusun oleh Ditjen Cipta Karya tersebut didasarkan kepada 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan peranan Metropolitan Bandung dalam wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sesuai dengan fungsinya,
- b. Perkembangan tata kehidupan masyarakat Metropolitan Bandung,
- c. Perkembangan lingkungan hidup Metropolitan Bandung.

Sesuai dengan Rencana tersebut, Sistem Metropolitan Bandung yang diharapkan akan terwujud pada tahun 2001, adalah terdiri dari wilayah sebagai berikut (*Catatan: Kondisi tahun 1984, sebelum perluasan Kotamadya Bandung*), yaitu:

- a. Kota Induk Metropolitan Bandung, meliputi Kotamadya Bandung, Cimahi, Lembang, Cicadas, Buah Batu, Ujung Berung, Dayeuh Kolot.
- b. Kota-kota kecil, meliputi Padalarang, Batujajar, Ciparay-Majalaya, Pameungpeuk-Banjaran, Rancaekek, Soreang, dan Cicalengka.

Kemudian, berdasarkan hasil studi *National Urban Development Strategy* (NUDS) tahun 1985, Metropolitan Bandung ditetapkan sebagai kota metropolitan ketiga setelah Metropolitan Jakarta dan Metropolitan Surabaya, dengan wilayah yang terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung (termasuk Cimahi), dan 3 kecamatan di Kabupaten Sumedang. Dalam konteks Kota Metropolitan Bandung tersebut, direncanakan bahwa Kota Bandung sebagai kota inti, sedangkan Padalarang, Soreang, Banjaran, Ciparay, Majalaya, Cicalengka, dan Lembang sebagai kota-kota *sub* Pusat. Disebutkan juga, bahwa sekitar 10 – 15 tahun setelah penetapan tersebut perlu diadakan *review* pada kenyataan perkembangan kota yang telah terjadi.



Gambar 3.1
Rencana Struktur Metropolitan Bandung 2001 (Ditjen CK, Dep. PU, 1984).

Selanjutnya, pada permulaan bulan Juli 1993, studi mengenai Metropolitan Bandung Urban Development Programme (MBUDP) dimulai dengan mengacu kepada studi BUDP II yang telah merumuskan strategi perkembangan Kota Metropolitan secara terpadu dan terkendali melalui upaya-upaya dan program-program pembangunan yang menunjang pertumbuhan dan meningkatkan daya tampung kota-kota di Metropolitan Bandung.

MBUDP membedakan strategi ruang perkotaan (*Urban Spatial Strategy*) ke dalam 2 tingkatan strategi pembangunan perkotaan, yaitu :

- a. Manajemen perkotaan.
- b. Dekonsentrasi pertumbuhan kota.

Manajemen perkotaan diskenariokan ke dalam 3 (tiga) skenario strategi pembangunan perkotaan, yaitu sesuai pertumbuhan pasar, intervensi minimum dan intervensi maksimum. Kelemahan dan keuntungan dari masing-masing strategi dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2.

Sedangkan, dekonsentrasi pertumbuhan kota diskenariokan ke dalam 2 (dua) skenario strategi pembangunan perkotaan, yaitu:

1. Pengembangan koridor-koridor perkotaan yang dibatasi dengan kawasan penyangga tanaman hijau, dan
2. Pertumbuhan pusat-pusat kota yang tidak berdekatan dengan kawasan penyangga.

Tabel 3.1
Strategi Pembangunan Perkotaan Melalui Manajemen Perkotaan

NO.	ALTERNATIF STRATEGI	KELEMAHAN	KEKUATAN
1.	Dorongan pasar	<ul style="list-style-type: none"> Degradasi lingkungan Pengembangan industri yang tidak berkelanjutan lingkungan Menurunkan kenyamanan kota 	<ul style="list-style-type: none"> Daftar pendanaan jangka pendek. Penerapan yang tertentu Memaksimalkan penyediaan perumahan
2.	Intervensi Minimum	<ul style="list-style-type: none"> Sulit untuk dicapai Biaya sektor publik yang tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Biaya potensial yang efektif bagi penyelesaian kegagalan pasar. Melindungi sumber daya yang penting. Merespon terhadap kebijakan lokal.
	Intervensi Maksimum	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi investasi sektor privat. Biaya sektor publik yang tinggi dalam jangka pendek. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung kebijakan perencanaan lokal Meningkatkan kenyamanan kota Bersifat ekonomis dalam jangka panjang

Sumber : BUDP II, MBUDP *Assistance to Programme Preparation. Report No. 24.7 March 1994. Urban Spatial Strategy.*

Tabel 3.2.
Strategi Pembangunan Perkotaan Melalui Dekonsentrasi Pembangunan Perkotaan

NO.	ALTERNATIF	KELEMAHAN	KEKUATAN
1.	Koridor- koridor perkotaan yang dibatasi dengan tanaman hijau	<ul style="list-style-type: none"> Tidak didukung oleh kebijakan lokal Kehilangan lahan sawah. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat dilakukan. Mengenali dan menerapkan strategi. Biaya yang tinggi jika mengakses daerah hijau. Meminimumkan pasar yang tidak pada tempatnya
2.	Pertumbuhan Pusat-pusat Kota yang tidak berdekatan dengan daerah penyangga	<ul style="list-style-type: none"> Sulit untuk dilakukan. Intervensi pada tingkat yang lebih tinggi. Biaya ekonomi dan kondisi yang penting. Daerah penyangga yang tidak berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung kebijakan lokal. Melindungi lahan sawah. Meningkatkan tenaga kerja di kota kecil.

Sumber : BUDP II, MBUDP *Assistance to Programme Preparation. Report No. 24.7 March 1994. Urban Spatial Strategy.*

Berdasarkan kondisi yang ada pada tahun perencanaan (1995-1997), strategi terpilih adalah strategi intervensi minimum. Kekuatan dari strategi ini adalah memberikan proteksi yang cukup bagi sumber daya alam yang penting, membuka peluang bagi kerjasama dengan swasta, serta responsif terhadap kebijakan pemerintah daerah. Penjabaran atas strategi ini terhadap aspek "ruang" yang menyangkut pengembangan sistem kota-kota dapat dilihat pada tabel 3.3.

Dengan mengacu kepada strategi intervensi minimum, maka untuk memilih strategi pengembangan ruang perkotaan, perlu ditentukan bentuk intervensi apa yang berkaitan erat dengan pola dekonsentrasi pertumbuhan kota yang diharapkan. Satu bentuk intervensi yang ditawarkan oleh studi BUDP II/MBUDP adalah keberadaan zona penyangga yang dapat membatasi pertumbuhan zona utama-inti (kota Bandung) dengan kota-kota pertumbuhan di sekitar kota inti. Oleh karena itu, strategi pengembangan ruang perkotaan terpilih adalah strategi pertumbuhan pusat-pusat kota yang tidak berdekatan dengan intervensi daerah penyangga. Walaupun sulit untuk dicapai dan membutuhkan biaya yang cukup besar, namun strategi ini memiliki kelebihan tertentu, yaitu memberikan proteksi yang memadai terhadap alih fungsi

sawah irigasi, meningkatkan lapangan kerja di kota-kota kecil, serta mendorong kebijakan pemerintah daerah setempat.

Tabel 3.3.
Sistem Kota-Kota

No	Kota	Status	Aktivitas	Pembangunan
1	Bandung	Pusat regional	Metropolitan yang multifungsional	Regional yang tetap terkendali
2	Jatinangor/ Cileunyi	Pusat regional	Pendidikan, perumahan, perdagangan	Pertumbuhan alami / diarahkan
3	Cimahi	Pusat subwilayah metropolitan	Perumahan, perdagangan, pariwisata	Pusat alami
4	Lembang	Pusat subwilayah metropolitan	Perumahan, perdagangan, pariwisata	Pertumbuhan alami
5	Rancaekek/ Cicalengka	Pusat subwilayah	Perumahan, perdagangan, industri	Pusat pertumbuhan sekunder
6	Ngamprah/ Padalarang	Pusat subwilayah	Industri, perumahan, perdagangan	Pusat pertumbuhan
7	Soreang	Pusat subwilayah	Administrasi, perumahan	Pusat pertumbuhan primer
8	Banjaran/ Pameungpeuk	Pusat subwilayah	Industri, perumahan, perdagangan	Pusat pertumbuhan sekunder
9	Majalaya	Pusat subwilayah	Industri, perumahan, perdagangan	Pusat pertumbuhan primer
10	Ciwidey	Pusat lokal	Perumahan, pariwisata	Pertumbuhan alami
11	Cililin	Pusat lokal	Industri, perumahan	Pertumbuhan alami.
12	Batujajar	Pusat lokal	Industri, perumahan, perdagangan	Pertumbuhan alami
13	Margahayu/ Dayeuhkolot	Pusat lokal	Industri, perumahan, perdagangan	Pertumbuhan alami
14	Tanjungsari	Pusat lokal	Perumahan, perdagangan	Perkembangan terbatas

Sumber : BUDP II, MBUDP *Assistance to Programme Preparation. Report No. 24.7 March 1994. Urban Spatial Strategy.*

Namun demikian, dengan melihat perkembangan pemanfaatan ruang yang terjadi selama kurun waktu 1994-2001, maka sepertinya strategi pengembangan ruang perkotaan terpilih tidak dapat dipertahankan kembali. Pertumbuhan kawasan terbangun di sekitar jalan Soekarno-Hatta telah meluas ke arah selatan dan telah membentuk suatu koridor pertumbuhan dengan kota-kota kecil seperti Soreang dan Banjaran. Bahkan pada skala yang lebih kecil, telah terbentuk pula koridor Banjaran dan Cimaung.

Demikian pula halnya dengan pertumbuhan kota Cimahi yang mengakibatkan bersatu dan meluasnya kota inti Metropolitan Bandung. Pertumbuhan fisik kota yang sedemikian kuat dan menyebar, berimplikasi kepada kebutuhan untuk menstrukturkan kembali pengembangan ruang perkotaan di Metropolitan Bandung.

3.2. Analisis Sosial Ekonomi

3.2.1. Aspek Kependudukan

Berdasarkan data kependudukan yang ada pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (2001), Kota Cimahi (2002), Kabupaten Bandung (1999), serta RTRW Kabupaten Sumedang (2002), jumlah penduduk yang berada di wilayah Metropolitan Bandung mencapai 6,9 juta jiwa, dimana sebagian besar terkonsentrasi di Kota Bandung (2,3 juta jiwa) dengan tingkat kepadatan mencapai 139 jiwa/ha. Kepadatan penduduk terendah adalah 13 jiwa/ha terjadi di Kabupaten Bandung.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung pada tahun 2002 merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai 4,37%. Dengan memperhatikan angka proyeksi jumlah penduduk sampai dengan tahun 2025, menggambarkan semakin tingginya tekanan penduduk di Kota Bandung dan memungkinkan terjadinya permasalahan lingkungan, pelayanan prasarana dasar, dan lain sebagainya yang saat inipun sudah dirasakan. Oleh karenanya, ke depan diperlukan suatu strategi untuk pemerataan penyebaran penduduk di wilayah Metropolitan Bandung.

Tabel 3.4
Proyeksi Penduduk Metropolitan Bandung sampai dengan Tahun 2025

Kawasan Metropolitan Bandung	Laju Pertumb. Pddk (%)	Jumlah Pddk 2002 (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk			
			2005	2010	2015	2025
Kota Bandung	4,37	2.333.124	2.652.558	3.734.826	4.068.382	6.239.931
Kab. Bandung	2,80	3.927.575	4.266.815	4.898.571	5.623.866	7.412.524
Kota Cimahi	1,74	424.932	447.502	487.813	531.756	631.872
Kec. Tanjungsari	2,25	58.472	62.508	69.864	78.086	97.545
Kec. Cimanggung	3,00	6.406	7.000	8.115	9.407	126.428
Kec. Cikeruh	3,00	84.846	92.714	107.480	124.599	167.451
Total	2,86	6.835.355	7.529.097	9.306.669	10.436.096	14.677.776

Sumber : Hasil Analisis

Strategi penyebaran penduduk ini sangat bergantung kepada bagaimana mengupayakan agar aktifitas sosial ekonomi yang tumbuh di Kota Bandung dapat terdistribusi ke wilayah sekitarnya. Penyebaran aktifitas sosial ekonomi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada pada suatu wilayah, baik menyangkut sumberdaya manusia, ketersediaan sumberdaya alam (lahan, air, dll), serta dukungan ketersediaan berbagai infrastruktur perkotaan yang juga diorientasikan untuk pemerataan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan skala pelayanan yang direncanakan.

Dalam merencanakan pemindahan aktifitas sosial ekonomi perkotaan yang telah berkembang di Kota Bandung, diperlukan suatu upaya penyesuaian antara kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh aktifitas sosial ekonomi dengan ketersediaan kualitas sumberdaya manusia yang berada di wilayah sekitarnya, mengingat sifat dari aktifitas perkotaan yang membutuhkan suatu kualifikasi tenaga kerja/sumberdaya manusia minimal.

Berdasarkan data Suseda Tahun 2003 yang menggambarkan kondisi struktur penduduk berdasarkan pendidikan di 4 Kabupaten/Kota di Kawasan Metropolitan Bandung, terlihat bahwa masih terjadi perbedaan kualitas sumberdaya manusia yang cukup signifikan. Penduduk yang berada disekitar Kota Bandung sebagian besar masih berpendidikan setingkat Sekolah Dasar, sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi berada di Kota Bandung.

Tabel 3.5
Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Ijazah Tertinggi

Kab./Kota	Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki (%)										
	Tdk/Blm Prnh Sek.	Tdk/Blm Tamat	SD Sdrjat	SLTP Sdrjat	SLTA Sdrjat	SM Kejur.	D-I/D-II	D-III/Sarmud	D-IV/Univ.	S2/S3	Jumlah
Kota Bdg	0,4	9,12	24,29	21,67	28,46	6,69	1,44	2,58	5,11	0,25	100
Kab. Bdg	1,37	18,67	42,9	18,14	13,11	3,25	0,75	0,76	1,06	0	100
Kota Cmh Kab.	1,35	11,51	25,73	22,8	24,6	8,8	0,68	2,71	1,81	0	100
Sumedang	2,54	17,82	45,79	19,22	8,68	2,5	1,15	0,95	1,34	0	100
Total	5,66	57,12	138,71	81,83	74,85	21,24	4,02	7	9,32	0,25	400

Sumber : SUSEDA Jawa Barat, 2003

Dengan mempertimbangkan data tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, khususnya bagi penduduk yang berada di wilayah sekitar Kota Bandung, agar mampu bersaing dalam menyerap lapangan pekerjaan dari aktifitas sosial ekonomi yang akan disebarakan. Program peningkatan kualitas sumberdaya manusia harus direncanakan dengan matang agar sesuai dengan jenis aktifitas yang akan dikembangkan (link and match) dan mungkin saja mengarah pada peningkatan program pendidikan kejuruan yang akan menghasilkan tenaga kerja siap pakai.

3.2.2 Aspek Ekonomi

Analisis aspek ekonomi di Kawasan Metropolitan Bandung dilakukan untuk mengidentifikasi peran dari sektor-sektor ekonomi yang telah berkembang yang dapat berpotensi menjadi sektor ekonomi unggulan dalam mendukung pertumbuhan kawasan tersebut sampai dengan tahun 2025. Analisis yang dilakukan difokuskan kepada beberapa sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam menentukan besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, yang terjadi di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang tahun 2001-2003.

Sektor PDRB dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

- **Sektor Primer**, terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian
- **Sektor Sekunder**, terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, serta sektor bangunan
- **Sektor Tersier**, terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

a. Kota Bandung

Berdasarkan data PDRB kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2001-2003, terlihat bahwa sektor sekunder dan sektor tersier selalu berperan cukup signifikan dalam PDRB Kota Bandung. Dengan memperhatikan laju pertumbuhannya, sektor sekunder dan sektor tersier memiliki pertumbuhan di atas laju pertumbuhan PDRB, yaitu 7,39 % dan 7,07 % (ADH Konstan). Hal ini mengindikasikan cukup signifikannya peran kedua sektor tersebut bagi perkembangan ekonomi di Kota Bandung.

Sektor usaha berbasis industri pengolahan yang masih menjadi sektor andalan saat ini merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai permasalahan sosial ekonomi yang dipicu oleh konflik alam penggunaan sumberdaya lahan dan air di Kota Bandung, sehingga ke depan diperlukan adanya aktifitas ekonomi lain yang secara kuantitatif dapat menggantikan peran sektor industri akan tetapi tidak menimbulkan permasalahan lingkungan. Di sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa lainnya yang ada saat ini sangat berpotensi untuk terus berkembang mengingat kondisi tahun 2003 telah menjadi sektor unggulan serta memiliki laju pertumbuhan yang signifikan. Apabila mengamati permasalahan yang ditimbulkan oleh sektor ini, lebih mengarah kepada pola penggunaan lahan yang tidak terarah sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan kemacetan lalu lintas di pusat kota.

Dengan mencermati data PDRB Kota Bandung ADH konstan tahun 2003, dominasi dari kontribusi lapangan usaha industri pengolahan mulai digeserkan oleh peran lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran (62,71%). Lapangan usaha industri pengolahan berada pada peringkat ke dua dengan kontribusi sebesar 36,95 %. Sedangkan berdasarkan data laju pertumbuhan, lapangan usaha bank meningkat dan berada pada peringkat tertinggi (25,65 %). Lapangan usaha perikanan mengalami penurunan laju pertumbuhan sampai pada angka -8,42%. Dengan demikian, terdapat

beberapa lapangan usaha yang berpotensi untuk mensubstitusi lapangan usaha industri pengolahan adalah lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran. Mengingat sektor ini sangat erat kaitannya dengan peran swasta/investor, maka kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menggalakkan peran swasta agar ditingkatkan. Demikian pula di lapangan usaha bank, dengan laju pertumbuhan tertinggi sangat berpotensi untuk dikembangkan mengingat pentingnya lapangan usaha ini untuk meningkatkan peran lembaga keuangan di Kota Bandung.

b. Kabupaten Bandung

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2003 bertumpu pada sektor sekunder yaitu pada lapangan usaha industri pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar 57,43% dan laju pertumbuhan 4,62%. Sektor tersier terutama pada lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran memiliki kontribusi 14,79% dan laju pertumbuhan 6,22%. Sedangkan kontribusi sektor primer secara keseluruhan hanya 11,97% dengan laju pertumbuhan 2,70%. Sehingga dapat disimpulkan, membaiknya perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2003 masih didominasi peran sektor sekunder dan sektor tersier.

Apabila memperhatikan kecenderungan laju pertumbuhannya, pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun, hal ini mungkin disebabkan banyaknya pabrik yang gulung tikar akibat kondisi perekonomian yang merugikan. Kondisi ini dari sisi lingkungan menguntungkan, karena kecenderungan tekanannya semakin berkurang. Dengan demikian, sektor usaha yang secara potensi dapat didorong pertumbuhannya adalah di sektor usaha jasa hiburan dan rekreasi, yang apabila melihat potensi wilayah Kabupaten Bandung dapat diarahkan kepada kegiatan pariwisata alam.

c. Kota Cimahi

Kondisi Kota Cimahi sebagai salah satu kota baru yang dibentuk pada saat kebijakan otonomi daerah diberlakukan mempunyai perilaku perkembangan ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan Kota Bandung, mengingat sebelumnya Kota Cimahi merupakan bagian dari wilayah Kota Bandung. Perkembangan ekonomi yang dapat diamati dari data PDRB kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2001-2003 menunjukkan bahwa kontribusi terbesar pada PDRB Kota Cimahi ADH konstan pada tahun 2003 adalah sektor sekunder, yaitu di sektor usaha industri pengolahan (63,79%) serta sektor tersier, di lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran (15,80%). Dengan demikian, keberadaan sektor usaha industri pengolahan dan perdagangan tetap memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi, akan tetapi mengingat permasalahan lingkungan sebagai dampak dari keberadaan sektor usaha industri pengolahan, maka sektor perdagangan, hotel dan restoran perlu didorong pertumbuhannya.

d. Kabupaten Sumedang

Berbeda dengan Kota/Kabupaten lainnya di Kawasan Metropolitan Bandung, peran sektor primer masih cukup signifikan pada perkembangan ekonomi Kabupaten Sumedang walaupun sektor tersier masih menunjukkan persentase tertinggi. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Sumedang tahun 2003 ADH konstan, kontribusi lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran berada pada peringkat pertama (27,37%) dengan laju pertumbuhan yang meningkat menjadi 4,18%. Sedangkan pada lapangan usaha pertanian berada pada peringkat kedua (27,91%) dengan laju pertumbuhan yang menurun menjadi 0,79%.

Penurunan laju pertumbuhan sektor primer ini disebabkan kenaikan laju pertumbuhan sektor sekunder, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan orientasi pertumbuhan ekonomi, dimana sektor sekunder mengalami pertumbuhan yang positif sedangkan sektor lainnya cenderung negatif. Hal ini menggambarkan bahwa aktifitas ekonomi berbasis listrik, gas dan air bersih, industri pengolahan dan konstruksi bangunan mulai tumbuh di beberapa daerah di kabupaten Sumedang. Selain itu dengan melihat posisi Sumedang sebagai pintu masuk/ke luar dari arah Timur, maka di wilayah perkotaannya perlu di dorong perkembangan di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan di wilayah perdesaan, perlu dipertahankan aktifitas sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Secara umum, kontribusi PDRB Kawasan Metropolitan Bandung (berdasarkan ADHB maupun ADHK) terhadap PDRB Jawa Barat pada tahun 2003 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2002. Menurut data tahun 2003 peningkatan PDRB ADH Berlaku adalah dari 23,46% menjadi 23,94%. Sedangkan berdasarkan ADH Konstan peningkatan yang terjadi dari 25,43 % menjadi 25,77%. Perkembangan ekonomi yang terjadi dapat menjadi suatu indikasi bahwa semakin besarnya peran wilayah tersebut dalam pertumbuhan perekonomian Jawa Barat.

Untuk mengetahui sejauh mana sektor-sektor ekonomi yang merupakan sektor basis bagi pengembangan wilayah Metropolitan Bandung, perlu dilakukan analisis Location Quotient (LQ) terhadap sektor.

Atas dasar data dan hasil analisis pada pembahasan sebelumnya, yang merupakan sektor basis di Kawasan Metropolitan Bandung adalah sektor yang memiliki LQ >1, yaitu :

- Industri Pengolahan
- Listrik, Gas dan Air Bersih
- Bangunan/Konstruksi
- Perdagangan. Hotel dan Restoran
- Pengangkutan dan Komunikasi
- Keuangan Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- Jasa-Jasa

Dari uraian di atas, apabila dikaitkan upaya untuk mengatur kegiatan sosial ekonomi yang cenderung tumbuh di wilayah Kota Bandung dan dalam rangka mengarahkan pemanfaatan ruang Kawasan Metropolitan Bandung, serta mempertimbangkan keterbatasan sumberdaya air yang tersedia, maka beberapa sektor usaha yang perlu didorong pertumbuhannya agar diharapkan dapat menjadi sektor basis di Kawasan Metropolitan Bandung antara lain adalah :

- Lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, yang ditekankan pada di kegiatan perdagangan besar dan eceran (di Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang)
- Lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi, khususnya menyangkut jasa angkutan jalan raya dan jasa komunikasi (di Kota Bandung)
- Lapangan usaha bank dikembangkan di seluruh wilayah sehingga mendukung peningkatan peran lembaga keuangan/ perbankan
- Lapangan usaha jasa hiburan dan rekreasi, dimana berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung diarahkan kepada kegiatan pariwisata alam.
- Lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, yang diarahkan pada budidaya tanaman bahan makanan (padi, dll) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.

3.3 Analisis Infrastruktur

3.3.1 Analisis Sistem Transportasi

Untuk menjamin tersedia pelayanan publik bagi masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pada pasal 3 butir (3) disebutkan bahwa "Daerah Wajib Melaksanakan Pelayanan Minimal". Dalam hal ini Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat (pasal 2 ayat 4 butir b). Untuk bidang jalan, Departemen Kimpraswil telah mengeluarkan standar pelayanan minimal bidang jalan.

SPM di bidang jalan ini dikembangkan dalam sudut publik sebagai pengguna jalan, dimana ukurannya merupakan *common indicator* yang diinginkan oleh pengguna. Basis SPM dikembangkan dari 3 (tiga) keinginan dasar para pengguna jalan, yakni :

1. Kondisi jalan yang baik (tidak ada lubang)
2. Tidak macet (lancar sepanjang waktu)
3. Dapat digunakan sepanjang tahun (tidak banjir waktu musim hujan)

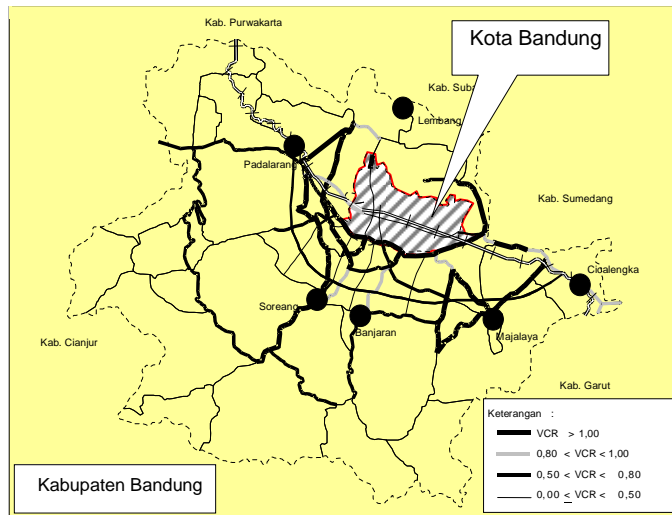
Dalam kaitan ini penyelenggara jalan harus mengakomodir tuntutan publik terhadap SPM dengan mengikuti norma/kaidah/aspek dibidang investasi jalan, yang meliputi aspek : efisiensi, efektivitas, ekonomi-investasi dan aspek kesinambungan.

Pada dasarnya item dalam SPM jalan hampir sama dengan kriteria kemantapan jalan dimana tujuan adalah memelihara jalan minimal dalam kondisi fisik yang sedang (indikator IRI), tidak macet ($VCR < 0,8$), lebar cukup dan jumlah panjang jaringan jalan yang mencukupi (aspek aksesibilitas dan mobilitas). Namun demikian untuk menetapkan kebutuhan pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan untuk mencapai 100% jalan mantap ataupun SPM jalan, namun juga terkait dengan kebutuhan jalan bagi pengembangan wilayah, dukungan bagi sektor dan kawasan andalan, prediksi kebutuhan lalu lintas di masa akan datang.

Tabel 3.6
Kinerja Jaringan Jalan Kab/Kota di Metropolitan Bandung dalam Penyediaan Jaringan Jalan Berdasarkan Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas

No.	Kab/Kota	Indeks aksesibilitas (Km/Km ²)			Indks Mobilitas (Km/1.000 Penduduk)		
		Eksisting	Min	Ket	Eksisting	Min	Ket
1	Kota Bandung	5,01	5,00	(+)	0,34	5,00	(-)
2	Kab. Bandung dan Kota Cimahi	1,05	5,00	(-)	0,89	2,00	(-)
3	Kab. Sumedang	0,35	0,50	(-)	0,06	5,00	(-)

Sumber : Penelitian Pengembangan Siste Jaringan Transportasi Wilayah Terpadu di Propinsi Jawa Barat
Keterangan : (+) di atas SPM (-) dibawah SPM



Sumber: :Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat – ITB

Indeks aksesibilitas (Panjang Jalan/Km2)	Indeks Mobilitas (Panjang Jalan/1000 Pddk)
<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Bandung masih di bawah SPM • Kota Bandung di atas SPM • Kab. Sumedang di bawah SPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Bandung masih di bawah SPM • Kota Bandung di bawah SPM • Kab. Sumedang di bawah SPM

Ket : SPM = Standar Pelayanan Minimal

Gambar 3.2
Tingkat Pelayanan Jalan

Terlihat bahwa sisi kuantitas penyediaan jaringan jalan (relatif terhadap luas wilayah maupun terhadap jumlah penduduk) kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Bandung pada umumnya di bawah SPM (Standar Pelayanan Minimum), kecuali Kota Bandung dari sisi indeks aksesibilitas sedikit di atas SPM.

Dari sisi kualitas kondisi jalan (panjang jalan yang kondisinya rusak relatif terhadap panjang jalan keseluruhan) data tahun 2001 menunjukkan bahwa rata-rata untuk wilayah Metropolitan Bandung 45% dalam kondisi rusak.

Dalam penyediaan prasarana jalan (supply) sampai pada tahun 2025 diwilayah metropolitan Bandung harus ada jaringan jalan sepanjang 5.170 km dan jika dibandingkan dengan eksisting yang ada (3.990,6 km) maka harus ada pembangunan jalan baru sepanjang 1.179 km

Dari sisi moda transportasi proporsi saat ini didominasi oleh kendaraan mobil jenis penumpang pribadi sebesar 86%, angkutan umum 2,5% dan sisanya 11,5% kendaraan Barang.

Pergerakan orang yang terjadi di wilayah Metropolitan Bandung sebanyak 57% menggunakan angkutan pribadi. Kondisi tersebut harus diubah dengan berbagai kebijakan yang ditempuh seperti penyediaan sarana angkutan umum masal yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga masyarakat pengguna jalan mendapat keuntungan (nilai waktu dan BOK) dari penyelenggaraan sistem transportasi wilayah metropolitan Bandung

3.3.2 Analisis Sumberdaya Air

Secara umum sumber air di wilayah Metropolitan Bandung bersumber dari air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan yang berasal dari DAS Citarum dan Waduk Saguling banyak dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, sumber air baku air minum, air baku industri serta untuk pembangkit tenaga listrik. Sedangkan sumber air tanah akifer dalam (kedalaman lebih dari 40 m) banyak dieksploitasi untuk keperluan sumber air industri.

Kondisi hulu DAS Citarum yang telah rusak mengakibatkan meningkatnya fluktuasi aliran sungai, penurunan debit minimum serta peningkatan air larian, sedangkan eksploitasi air tanah secara intensif dan tidak terkendali terutama di daerah-daerah industri telah mengakibatkan penurunan muka air tanah. Hal ini menjadi penyebab utama penurunan daya dukung sumberdaya air yang diindikasikan dengan terancamnya ketersediaan air.

Proyeksi kebutuhan air, baik untuk kebutuhan pertanian maupun Rumah tangga Kota dan Industri (RKI) di Metropolitan Bandung pada 2010 mencapai 1,98 milyar m³/tahun, sementara potensi air yang dapat dimanfaatkan diperkirakan hanya mencapai 1,85 milyar m³/tahun (lihat tabel 3.7 dan 3.8). Potensi air tersebut berasal dari air permukaan sebesar 1,74 milyar m³/tahun dan air tanah sebesar 108 juta m³/tahun.

Tabel 3.7
Perbandingan Potensi dan Kebutuhan Air
di Metropolitan Bandung Tahun 2002, 2005 dan 2010

Tahun	Potensi (Juta M ³ /Tahun)	Kebutuhan (Juta M ³ /Tahun)	Perbandingan Kebutuhan Dan Potensi (%)
2002	1.850	1.710	92,4
2005	1.850	1.843	99,6
2010	1.850	1.985	107,3

Sumber : Kajian Rencana Pengelolaan Lingkungan Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Bapeda 2004 dan hasil pengolahan

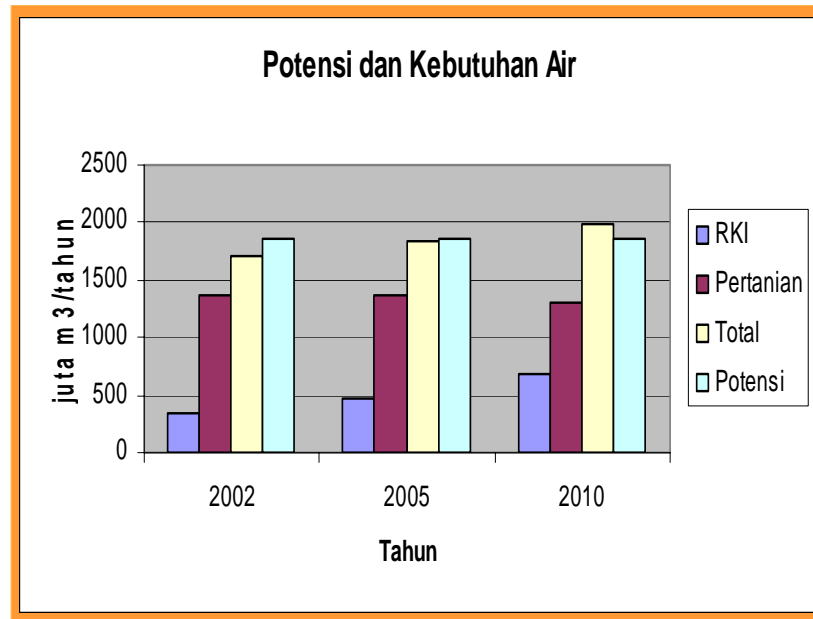
Keterangan :

- **Potensi** : Ketersediaan air permukaan dan air tanah yang dapat dimanfaatkan
- **Kebutuhan** : Kebutuhan air untuk Rumah tangga Kota Industri (RKI) dan pertanian.

Tabel 3.8
Kebutuhan Air di Metropolitan Bandung sampai Tahun 2010

Kabupaten/ Kota	Pengguna Air	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa) dan Pengguna Air (m ³ /dtk)		
		2002	2005	2010
Kab. Bandung	Penduduk	3.703.552	4.108.000	4.674.125
	Rumah Tangga	0.533	1.937	4.762
	Kota	0.158	0.725	1.856
	Industri	0.982	1.173	1.423
	Pertanian	40.868	39.969	39.070
	Total	42.540	43.804	47.210
		1.341 juta m ³ /th	1.381 juta m ³ /th	1.488 juta m ³ /th
Kabupaten/ Kota	Penduduk	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa) dan Pengguna Air (m³/dtk)		
		2002	2005	2010
	Kota Bandung	2.475.403	2.815.900	3.192.881
	RKI	7.650	9.250	10.900
	Pertanian	0.000	0.000	0.000
	Total	7.650	9.250	10.900
		241,3 juta m ³ /th	291,7 juta m ³ /th	343,7 juta m ³ /th
Kota Cimahi	Penduduk	442.477	512.518	564.256
	RKI	1.367	1.683	1.926
	Total	1.367	1.683	1.926
		43,11 juta m ³ /th	53,08 juta m ³ /th	60,74 juta m ³ /th
Kab. Sumedang (4 Kec)	Penduduk	234.160	256.495	288.687
	Rumah Tangga	0.034	0.121	0.294
	Kota	0.009	0.045	0.115
	Industri	0.062	0.073	0.094
	Pertanian	2.583	2.496	2.413
	Total	2.688	2.735	2.916
		84,76 juta m ³ /th	86,25 juta m ³ /th	91,96 juta m ³ /th
Jumlah		1,7 milyar m ³ /th	1,8 milyar m ³ /th	1,98 milyar m ³ /th

Sumber : Kajian Rencana Pengelolaan Lingkungan Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Bapeda 2004



Gambar 3.3
Grafik Potensi dan Kebutuhan Air

Berdasarkan perbandingan ketersediaan air dengan proyeksi kebutuhan air, diindikasikan bahwa pada tahun 2010, pasokan air untuk kebutuhan RKI dan pertanian akan mencapai 107,3% dari potensi air yang tersedia, dimana terlihat bahwa sekitar 65% kebutuhan air adalah untuk pertanian dan sisanya sekitar 35% untuk kebutuhan RKI. Dari perhitungan neraca air tersebut terlihat bahwa akan terjadi defisit antara ketersediaan dan kebutuhan air pada tahun 2010, sehingga fenomena kelangkaan air akan dihadapi. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan ketersediaan air, diantaranya melalui pembangunan waduk yang potensial, peningkatan pengelolaan sungai, serta memanfaatkan potensi air waduk eksisting yang besar.

3.3.3 Analisis Prasarana dan Sarana Permukiman

a. Air Bersih

Kebutuhan air bersih di Metropolitan Bandung dihitung berdasarkan proyeksi penduduk perkotaan di daerah perkotaan Metropolitan Bandung. Kapasitas prasarana air bersih dihitung berdasarkan kebutuhan perkapita rata-rata perhari diperkirakan sebesar 100 l/cap/hari. Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh kebutuhan air bersih untuk keperluan domestik Metropolitan Bandung. Penyediaan air bersih tersebut meliputi penyediaan air bersih perpipaan maupun non perpipaan, baik yang dikelola oleh PDAM maupun oleh investor ataupun masyarakat sendiri. Proyeksi kebutuhan air bersih di Kawasan Metropolitan Bandung dapat dilihat pada tabel 3.9.

Berdasarkan keterkaitannya dengan ketersediaan air baku, maka diperkirakan untuk pemenuhan pelayanan air bersih ke depan sistem penyediaan air bersih akan didominasi oleh air bersih perpipaan yang dikelola oleh PDAM atau investor terutama di setiap pusat-pusat wilayah pelayanan, mengingat akan makin tingginya tuntutan untuk mengefisienkan pengelolaan akibat keterbatasan ketersediaan sumber air baku permukaan dan air tanah.

Tabel 3.9
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Metropolitan Bandung Tahun 2002-2025

Total	Tahun 2002	Tahun 2005	Tahun 2010	Tahun 2015	Tahun 2020	Tahun 2025
Penduduk Metropolitan Bandung	6.893.009	7.592.097	8.929.938	10.520.763	12.415.471	14.675.733
Kebutuhan air (m ³ /hari)	689.300,9	759.209,7	892.993,8	1.052.076,3	1.241.547,1	1.467.573,3

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Selain kebutuhan domestik, kebutuhan non domestik dihitung berdasarkan persentase terhadap kebutuhan domestik. Kebutuhan non domestik meliputi perkantoran, pendidikan, perdagangan, rumah sakit, industri kecil dan kegiatan sosial. Persentase kebutuhan non domestik antara (10-25)% dari kebutuhan domestik.

b. Drainase

Analisis kebutuhan prasarana drainase dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kondisi sistem drainase dan pengendalian banjir yang ada, serta permasalahan-permasalahan apa saja yang menyebabkan banjir. Analisis sistem drainase dilakukan berdasarkan tujuan sistem drainase secara umum, yaitu:

- Secepat mungkin membuang air hujan yang sudah berbahaya atau mengganggu lingkungan menuju badan air penerima tanpa mengakibatkan erosi, endapan atau penyebaran erosi,
- Tidak terjadi genangan, banjir, becek, terutama daerah yang selalu mengalami banjir setiap musim hujan,
- Sebagai konservasi sumberdaya air permukaan/tanah.

Analisis permasalahan utama drainase dapat dilihat pada tabel 3.10.

Berdasarkan data sistem drainase yang ada, secara umum dapat diketahui, bahwa pemeliharaan sistem drainase mikro yang sudah ada masih sangat kurang, tidak ada pembangunan sistem drainase mikro sesuai standar dan kriteria sebagai konsekuensi logis pengembangan kawasan perkotaan serta masih kurangnya perhatian terhadap peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase makro atau badan air penerima. Selain itu, berdasarkan kondisi yang ada, saluran yang ada selain berfungsi sebagai drainase yang khusus mengalirkan air hujan juga berfungsi sebagai saluran air limbah domestik yang mengalirkan limbah cair maupun padat dari rumah tangga. Ada juga saluran irigasi yang difungsikan sebagai saluran drainase dengan akibat terganggunya fungsi irigasi dan tidak optimalnya fungsi drainasenya.

Berkaitan dengan kondisi topografi Cekungan Bandung dan aliran Sungai Citarum yang berkelok-kelok dan mempunyai beda elevasi yang rendah, maka terdapat kawasan yang sangat kritis terhadap ancaman genangan air, yaitu Kawasan Bojongsoang dan tegalluar, sehingga sebagai suatu sistem drainase makro dan mikro perlu dilakukan penanganan secara khusus.

c. Air Limbah (IPAL Terpadu)

Sebagaimana diuraikan terdahulu, potensi limbah domestik akan naik pesat seiring kenaikan jumlah penduduk, potensi dampak pencemaran limbah domestik naik terhadap sistem perairan, lahan, maupun dari timbulan sampah akan dominan di masa depan (tahun 2025), apabila limbah domestik yang dihasilkan tersebut tidak diolah terlebih dahulu. Sistem septik tank hanya efektif untuk skala rumah tangga atau perumahan sedang. Semakin tingginya kepadatan penduduk, dan lahan yang tersedia, sistem septic tank akan sulit dibuat dan tidak efektif. Keberadaan IPAL

Domestik Bojongsoang saat ini masih belum cukup membantu mengatasi limbah domestik, karena kapasitasnya diperkirakan baru untuk 500.000 jiwa. Apabila limbah penduduk yang melalui septik tank diperhitungkan sebesar 30%, maka potensi limbah cair domestik yang terbuang ke sungai masih sangat besar atau sekitar 4 juta jiwa. Kondisi di atas menggambarkan perlunya ketersediaan IPAL – Domestik untuk mengatasi permasalahan besarnya potensi limbah cair domestik. IPAL Domestik dapat berbentuk sistem-sistem komunal yang diintegrasikan dengan sistem skala perumahan atau skala permukiman.

Tabel 3.10
Analisis Permasalahan Utama Drainase

Jenis Masalah	Akibat	Ulasan
Operasi dan pemeliharaan yang kurang memadai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem tidak memadai ▪ Penyumbatan ▪ Ketidakberesan saluran ▪ Pelatihan yang kurang cukup 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjurus semakin buruknya daerah banjir ▪ Sistem menjadi tidak memadai seperti yang tidak diharapkan ▪ Sistem tidak dapat bertahan sesuai usia desain
Manajemen persampahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyumbatan-penyumbatan ▪ Gangguan kesehatan ▪ Pembuangan sampah dalam saluran-saluran dan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menaikan frekuensi dan memperluas daerah banjir ▪ Hanya sekitar 50-70% sampah yang terangkut di Kota Bandung ▪ Mengganggu estetika
Pembuangan air kotor langsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menaikan polusi bakteriologi ▪ Sedimentasi ▪ Penyumbatan-penyumbatan ▪ Gangguan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menaikan frekuensi dan memperluas daerah banjir ▪ Penggelontoran kurang memadai ▪ Mengurangi potensi wisata sungai
Ketersediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membatasi pekerjaan ▪ Mengurangi tingkat pelayanan ▪ Membatasi frekuensi dan penurunan luas genangan ▪ Membatasi pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua sumber dan harus diidentifikasi ▪ Cost recovery harus dimaksimalkan
Tekanan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semakin langkanya ketersediaan lahan ▪ Penyempitan sungai dan daerah banjir ▪ Naiknya volume aliran permukaan ▪ Kenaikan aliran puncak ▪ Menaikan frekuensi dan memperluas daerah banjir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadinya konflik antara pembebasan tanah dan tingkat pelayanan ▪ Pembuatan kantong-kantong air hendaknya digalakan
Perbedaan kepentingan saluran irigasi/drainase	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struktur irigasi di beberapa tempat menyebabkan permukaan air naik ▪ Pintu air berbeda dengan kepentingan drainase 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan banjir ▪ Pintu air membutuhkan operasi yang baik ▪ Beberapa bendung tidak digunakan lagi
Kapasitas yang tidak mencukupi akibat desain yang kurang baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengurangi tingkat pelayanan ▪ Menyebabkan banjir lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memerlukan rehabilitasi ▪ Meningkatkan banjir

Sumber : Renstra Infrastruktur Wilayah Metro Bandung, 2004

Dari analisis sumber daya air menunjukkan bahwa sarana IPAL Terpadu akan dibutuhkan untuk daerah – daerah yang masih dimungkinkan adanya industri. Fungsi IPAL Terpadu sebagai upaya efektif dalam melakukan pengendalian pencemaran dan optimasi proses pengolahan limbah. Kapasitas dan karakteristiknya akan sangat bergantung kepada alternatif – alternatif industri-industri yang akan dilayani, misalnya untuk wilayah timur yang diharapkan menjadi kawasan industri non polutan akan berbeda dengan wilayah barat yang diharapkan menjadi kawasan relokasi industri proses, kimia, atau manufaktur. Sehingga di wilayah barat perlu adanya IPAL B3 yang terintegrasi dengan IPAL Terpadu. IPAL B3 berfungsi melayani limbah B3 yang dihasilkan baik dari kegiatan yang menghasilkan limbah B3 seperti industri, rumah sakit, atau TPS/TPA.

IPAL B3 sangat penting karena limbah B3 harus diolah tersendiri dan khusus sesuai aturan yang telah ada. Limbah B3 yang dihasilkan dari wilayah Cekungan Bandung saat ini sekitar 520 ton per tahun (studi WJEMP), sementara fasilitas pengolahan limbah B3 di Cileungsi Bogor hanya mampu menangani rata-rata 200 ton per tahun. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan di masa depan, karena banyak sekali limbah B3 yang tidak terolah, tercampur dengan limbah domestik, dan tidak tahu dibuang kemana di wilayah Metro Bandung.

d. Persampahan (Tempat Pembuangan Akhir Sampah - TPA)

Jumlah penduduk Metropolitan Bandung yang diperkirakan mencapai lebih kurang 11 juta jiwa pada tahun 2010 dan mencapai lebih kurang 14 juta jiwa pada tahun 2020, akan menghasilkan timbulan sampah sekitar 6.000 ton/hari pada tahun 2010, dan sekitar 8.000 ton/hari pada tahun 2025. Kondisi ini memerlukan penanganan khusus, sistem pengelolaan sampah terpadu untuk wilayah Metropolitan Bandung merupakan pilihan yang tidak dapat ditawar, mengingat keterbatasan lahan TPA dan TPS. Kapasitas TPA yang ada sekarang (TPA Leuwi Gajah, TPA Jelekong) dengan sistem operasi yang digunakan diperkirakan hanya mampu menampung sampah untuk 5 tahun ke depan.

Berdasarkan perkiraan kebutuhan tersebut, maka ketersediaan TPA Regional yang mempunyai kapasitas besar (minimal 8.000 ton/hari) dan berlokasi strategis dari sisi daya dukung lahan diperlukan untuk mengolah sampah di seluruh wilayah Metro Bandung. Sistem operasi pengelolaan sampah yang masih berorientasi ambil, angkut, dan buang harus diganti dengan sistem pemilahan, reduksi volume, dan daur ulang. Pemilihan teknologi pengolahan sampah harus mampu mengaplikasikan teknologi terbaik yang tepat tanpa menimbulkan polusi.

Selain itu, diperkirakan sampai tahun 2010 cakupan wilayah pelayanan masih berada di bawah angka 50% apabila tidak ada upaya khusus untuk mengatasi persoalan tersebut. Akibat tingkat pelayanan yang rendah tersebut, sebagian besar sampah dibakar atau dibuang sehingga akan berdampak terhadap pencemaran udara, lahan, maupun perairan. Pada beberapa wilayah kota, tumpukan sampah di saluran drainase menyebabkan kasus-kasus banjir lokal pada saat musim hujan.

Alokasi penempatan lokasi TPA dan beberapa TPS akan menimbulkan potensi dampak negatif apabila tidak dikaji secara benar, terutama dari pola pergerakan angkutan truk sampah terhadap kemacetan, lingkungan yang dilewati. Biaya terbesar pengolahan sampah selama ini adalah dari sistem pengangkutan, sehingga di masa depan akan lebih efektif bila distribusi pengolahan sampah dilakukan di setiap TPS yang dintegrasikan dengan sistem permukiman, menggunakan sistem operasi dan teknologi pemilahan, reduksi volume, dan daur ulang. Pola ini akan lebih efektif, terutama mengurangi dampak negatif saat dibawa ke TPA. Dengan pola ini, TPA Leuwigajah yang sebenarnya sudah tidak layak dari lokasi dan sistem operasinya dapat direhabilitasi, diganti sistem operasinya, difungsikan sebagai TPS. Beberapa TPA Regional perlu dibangun untuk melayani pengelolaan sampah Metro Bandung. Beberapa TPA Regional yang telah diusulkan adalah di daerah Cipatat untuk melayani Wilayah Barat dan Kota Bandung Barat, Pasir Durung untuk melayani wilayah Timur dan Bandung Timur, dan Jelekong untuk melayani wilayah Kota Bandung Selatan, Soreang, dan Banjaran. Khusus untuk wilayah Bandung Utara fungsi TPA Pasirbuluh dapat ditingkatkan sistem operasi dan teknologinya untuk TPA lokal, kerana memperhitungkan aksesibilitasnya.

Dari sistem distribusi lokasi dan perbaikan sistem pengelolaan sampah tersebut diharapkan di masa depan dampak-dampak negatif dari sektor persampahan akan dapat diminimalisasi, dan fungsi-fungsi pelayanan terhadap masyarakat dapat meningkat.

3.4 Analisis Guna Lahan

Pertumbuhan lahan terbangun dalam kurun waktu 1994-2001 menunjukkan kecenderungan penurunan dan kenaikan di jenis penggunaan lahan tertentu (lihat sub. bab 2.2). Untuk sektor sekunder dan tersier yang kedepan akan diproyeksikan menjadi sektor basis di wilayah Metropolitan Bandung, dalam kurun waktu tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara luasan lahan, maka guna lahan kawasan dan zona industri meningkat sebesar 5% serta permukiman meningkat 50,98%. Kecenderungan tersebut diperkirakan akan tetap meningkat sampai dengan tahun 2025. Sementara itu untuk lahan sawah dalam kurun waktu tersebut memperlihatkan kecenderungan yang terus menurun yaitu sebesar 23,41% diperkirakan akan cenderung menurun pula sampai dengan tahun 2025.

Sementara itu jika dikaitkan dengan kebijakan pola tata ruang Propinsi Jawa Barat, maka di wilayah Metropolitan Bandung kawasan yang seharusnya berfungsi lindung adalah seluas 144.269,7 ha atau sebesar 30,28% yang tersebar terutama di bagian Utara dan Selatan, dan kawasan budidaya seluas 238.847,75 ha. Lahan –lahan yang seharusnya menjadi kawasan lindung tersebut dalam kurun waktu 1994-2001 mengalami kecenderungan yang terus menurun dan terkonversi menjadi lahan terbangun terutama di kawasan lindung non-hutan. Kondisi ini diasumsikan akan terus menurun sampai dengan tahun 2025. Berikut ini adalah tabel kecenderungan lahan terbangun di kawasan lindung dan kawasan budidaya pada kurun waktu 1994-2001.

Tabel 3.11
Luasan Kawasan Lindung dan Budidaya

POLA TATA RUANG	LUAS (Ha)	Lahan Terbangun 1994	Lahan Terbangun 2001	Kenaikan	Kenaikan (%)
Hutan Konservasi	21.431,8	42,8	152,8	110,0	257,00
Hutan Lindung	72.715,5	393,4	1.558,2	1.164,8	296,08
Lindung Non Hutan	50.122,4	886,8	2.518,0	1.631,2	183,94
SUB TOTAL	144.269,7	1.323	4.229	2.906	219.65
Hutan Produksi	12.393,9	150,9	592,2	441,3	292,44
Budidaya	183.067,2	39.558,1	54.592,9	15.034,8	38,00
Diluar terbangun		143.504,0	128.416,4	-15.087,6	-10,51
SUB TOTAL	195.461,1	183.213	183.601,5	388,5	21,20
Danau/ Waduk/Situ	7.805,4	7.805,4	7.805,4	-	-
TOTAL	347.536,2	41.032,0	59.414,1	18.382,10	-

Sumber : Hasil Analisis, Bapeda 2005

Keterangan : luasan berdasarkan pola tata ruang tersebut adalah luasan normatif berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam RTRWP.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara totalitas perkembangan lahan terbangun dalam kurun waktu 1994-2001 terjadi di kawasan lindung dan hanya sedikit saja yang terjadi di kawasan budidaya. Bila kecenderungan ini tetap berlangsung maka diproyeksikan perkembangan lahan terbangun akan mengancam keberadaan kawasan lindung.

3.5 Analisis Daya Dukung Lingkungan Metropolitan Bandung

Analisis daya dukung lingkungan pada bagian ini beranjak pada analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, terutama berkaitan dengan perkembangan kependudukan, sosial ekonomi, ketersediaan lahan dan sumber daya air, serta rencana pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan di Metropolitan Bandung. Analisis daya dukung lingkungan akan lebih menekankan pada potensi dampak penting yang akan berkembang apabila rasio suplai demand terlampaui

atau belum, bagaimana interaksi satu dampak dengan dampak ikutan lainnya untuk suatu pengembangan kegiatan atau wilayah sehingga menjadi faktor pembatas atau pendukung pengembangan wilayah, struktur ruang, dan kegiatannya di Metroploitan Bandung. Untuk lebih sistematis dan fokus, analisis akan ditinjau dari daya dukung lahan, sumber daya air, infrastruktur wilayah, dan kualitas udara.

a. Daya dukung lahan

Hasil analisis guna lahan menunjukkan bahwa secara umum ketersediaan lahan di wilayah Metro Bandung untuk kawasan budidaya yang dapat dikembangkan hanya seluas 94.056,1 Ha, dengan pertimbangan utama adalah masih tetap mempertahankan lahan sawah eksisting. Dari sisi kebutuhan lahan untuk perumahan yang diproyeksikan seluas 18.344,67 ha pada tahun 2025, kondisi di atas masih cukup memenuhi. Permasalahan utama cenderung terjadi di Kota Bandung dan Cimahi yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk tinggi dan luas kawasan terbangun eksisting di atas 60%, sehingga pada wilayah ini pemanfaatan lahan, terutama perumahan, harus diarahkan secara vertikal.

Pengembangan kawasan budi daya di luar wilayah Kota Bandung dan Cimahi, harus tetap mengacu kepada kebijakan pola tata ruang untuk menjaga dan mempertahankan luas kawasa lindung, sehingga pola pengembangan kawasan tidak meluas dan mengarah ke arah bagian Utara dan Selatan yang berfungsi sebagai kawasan yang berfungsi lindung. Melihat kondisi fisik wilayah, ketersediaan infrastruktur, dan pola arah angin di Metro Bandung, maka arah pengembangan kawasan budidaya seharusnya diarahkan pada koridor Barat – Timur, karena akan meminimisasi potensi dampak negatif yang muncul, karena penyebaran permukiman akan terjaga, dinamika transport polutan udara terjaga pada arah Timur Barat dan dapat dikurangi tingkat konsentrasinya dengan adanya kawasan vegetasi di utara, selatan, dan barat. Disisi lain, secara alami, aliran utama sungai Citarum yang berfungsi sebagai pasokan utama sumber daya air dan sistem drainase di Wilayah Metro Bandung, juga mengalir dari Timur ke Barat, jadi secara alamiah pun kesesuaian pembangunan di wilayah ini secara ekologi adalah sepanjang koridor bagian tengah dari Timur ke Barat.

Apabila mempertimbangkan aspek sistem daerah aliran sungai, maka pola pembangunan kawasan budidaya pada koridor Timur yang lebih berfungsi sebagai bagian hulu aliran sungai Citarum, harus terbebas dari peruntukan lahan dan aktivitas kegiatan yang berpotensi menimbulkan beban pencemaran berat di masa mendatang (Rancaekek, Cicalengka, Majalaya, Banjaran), karena semakin terbatasnya pemanfaatan air bawah tanah maka air permukaan akan menjadi alternatif utama di masa depan.

b. Daya dukung sumber daya air

Ketersediaan air baku terutama air bersih bagi pengembangan wilayah Metro Bandung dengan semua aktivitasnya merupakan faktor penting yang harus menjadi perhatian utama. Fenomena kelangkaan air baku yang telah mulai dirasakan di beberapa daerah di wilayah Metro Bandung, skalanya akan lebih besar apabila aspek pemanfaatan dan rehabilitasi sumber-sumber air tidak segera dilakukan. Analisis terhadap rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku menunjukkan bahwa laju kebutuhan air akan meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan jenis kegiatan. Pada tahun 2010, diperkirakan tingkat kebutuhan air telah melampaui potensi yang dapat dimanfaatkan, kenaikan terutama untuk rumah tangga dan kegiatan perkotaan.

Kondisi tersebut merupakan indikator, bahwa efisiensi pemanfaatan air dan upaya – upaya lain untuk memperoleh sumber-sumber baru untuk tambahan air baku harus

mulai dilakukan saat ini. Potensi terbesar adalah dari air permukaan, baik dari sungai dan waduk, yang diperkirakan lebih dari 5 milyar m³/tahun. Rehabilitasi dan pemulihan kondisi air bawah tanah, selain diharapkan sebagai sumber air bersih utama penduduk, akan berdampak pada meningkatnya fungsi-fungsi konservasi, baik konservasi air maupun lahan. Air permukaan dan air tanah walaupun wujud dan keberadaannya berbeda-beda namun sumberdaya air tersebut memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya, membentuk satu kesatuan sistem tata air dalam suatu wilayah Daerah Airan Sungai (DAS), yakni DAS Citarum.

Kritisnya keadaan airtanah di Cekungan Bandung, salah satunya ditandai oleh besarnya pengambilan air tanah tahunan yang sudah mencapai 140 juta m³, terhadap besarnya volume peresapannya yang hanya sekitar 108 juta m³ atau telah mengalami defisit. Dampak yang muncul adalah terjadinya penurunan muka air tanah yang terus menerus, dalam kisaran antara 0,25 hingga 8,0 m/tahun pada beberapa sumur pantau, yang kemudian menyebabkan penurunan produksi rata-rata sumur bor di Cekungan Bandung, serta dampak yang lebih parah lagi yakni terjadinya penurunan / amblesan tanah di beberapa tempat dataran Bandung. Di daerah padat industri (Dayeuhkolot, Leuwigajah, Rancaekek, Ujung berung, Cikeruh), gejala penurunan tanah atau lebih populer dengan amblesan tanah telah nyata terjadi. Salah satu faktor penyebab amblesan tanah adalah penurunan tekanan hidrostatik air tanah akibat penurunan muka airtanah, serta pembebanan di atasnya. Bukti-bukti yang menunjukkan adanya perubahan tersebut diantaranya.

Upaya penanganan air tanah seharusnya mulai dilakukan saat ini, terutama pemanfaatannya di daerah-daerah industri. Melihat kondisi kritis yang ada, sudah seharusnya dilakukan substitusi pemakaian air baku yang berasal dari air tanah ke air permukaan. Kendala utama adalah kualitas air permukaan di hampir semua sungai dan waduk ternyata tidak memenuhi baku mutu untuk air baku (Golongan B). Sungai Citarum mulai dari hulu hingga ke intake Waduk Saguling telah menunjukkan kategori pencemaran sedang hingga sangat berat, kondisi ini juga terjadi pada beberapa anak sungai Citarum. Penyebab utama adalah pencemaran air, baik oleh industri dan domestik yang membuang limbahnya ke sepanjang sungai pada DAS Citarum. Industri proses, khususnya industri tekstil, kimia, dan elektroplating yang cukup dominan berada di Metro Bandung, merupakan industri yang berpotensi tinggi menghasilkan limbah cair dalam volume besar dan bersifat B3. Limbah domestik diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, sehingga potensi pencemaran oleh limbah domestik juga akan bertambah besar di masa depan apabila tidak ada upaya pengelolaan. Pertimbangan inilah yang harus diperhatikan untuk konsep pengembangan Metro Bandung, terutama dari struktur penyediaan sistem air baku dan air bersih. Alternatifnya adalah apakah melakukan upaya rehabilitasi kondisi kualitas air permukaan dengan berbagai upaya pengurangan emisi limbah cair, pengetatan standar baku mutu, baru melarang pemanfaatan air tanah oleh industri, atau melakukan upaya relokasi industri yang sebenarnya jauh efektif dengan resiko investasi tinggi, atau melakukan kedua-duanya.

Dari tinjauan peta pengendalian pemanfaatan air tanah, memperlihatkan bahwa daerah Kota Bandung, Cimahi, Baleendah, Rancaekek, Padalarang merupakan daerah daerah kritis dan rawan untuk pemanfaatan air tanah. Daerah Utara dan Selatan merupakan daerah yang secara dominan adalah daerah imbuhan. Daerah aman untuk pengambilan air tanah tersebar di luar kedua kriteria di atas, sepanjang koridor Timur Barat wilayah Metro Bandung. Dari sisi zonasi pemanfaatan air tanah tersebut tampak bahwa sudah saatnya dilakukan penertiban dan pengaturan ulang terhadap pemanfaatan air tanah, sehingga untuk masa mendatang (tahun 2025) aktivitas kegiatan yang secara intensif memanfaatkan air tanah dalam, terutama industri, yang berada pada zona rawan kritis, harus dilarang.

Penurunan daya dukung air tidak terlepas dari penurunan daya dukung lahan, khususnya kawasan – kawasan konservasi yang berfungsi untuk daur hidrologi pada satu sistem DAS. Dampak kerusakan DAS Citarum yang terjadi mulai dari daerah hulu, yang didindikasikan dengan menurunnya nilai indeks konservasi dari 0,7 menjadi 0,4 (BPLHD Jawa Barat, 2002), telah dapat dirasakan dari tahun ke tahun, dengan semakin turunnya debit minimum pada musim kemarau dan sebaliknya meningkat tajam pada musim hujan. Dampak yang dirasakan adalah fenomena kekeringan dan banjir yang selalu terjadi tiap tahun.

Sebagai indikator adalah, pada musim kemarau telah terjadi penurunan debit ekstrim minimum di Stasiun Nanjung dari 6,35 m³/detik menjadi 5,70 m³/detik, namun di musim hujan, nilai debit ekstrim maksimum meningkat dari 217,6 m³/detik menjadi 285,8 m³/detik. Dampak ini akan terus terjadi dalam skala yang lebih luas apabila upaya untuk menormalisasi rasio debit minimum dan maksimum tidak dilakukan. Fenomena banjir juga akan semakin diperparah dan meluas apabila tidak ada upaya untuk memperbaiki sistem drainase perkotaan, mengurangi air larian (run off), dan normalisasi daya tampung sungai, tidak dilakukan. Penataan infrastruktur perkotaan, konsistensi antara pemanfaatan ruang dengan pengendalian pemanfaatannya sangat diperlukan dalam penataan ruang Metro Bandung ke depan.

c. Daya dukung kualitas udara

Potret kualitas udara, khususnya di wilayah perkotaan Metro Bandung menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Fenomena kondisi eksisting memperlihatkan bahwa kontributor pencemar utama di perkotaan (Bandung, Cimahi) adalah dari sektor transportasi, diikuti industri, dan domestik. Kecenderungan ke depan (tahun 2025) akan sangat ditentukan oleh pola perkembangan ketiga sektor dominan di atas. Tingkat emisi polutan akan ditentukan oleh jenis, volume, dan sistem pembakaran yang dipakai oleh sektor-sektor tersebut. Dari sektor transportasi, faktor utama yang mempengaruhi tingkat emisi adalah kecepatan rata-rata kendaraan, disamping ketiga parameter di atas. Untuk sektor industri, faktor utama yang mempengaruhi tingkat emisi adalah bahan baku, jenis proses, peralatan proses, serta jenis alat pengendali emisi gas buangnya, disamping ketiga parameter di atas. Untuk domestik, rata-rata hanya dari jenis dan volume bahan bakar.

Dari analisis sistem transportasi tahun 2025 menunjukkan bahwa pengembangan sistem transportasi massal diharapkan akan mampu meningkatkan kecepatan rata-rata kendaraan di perkotaan, dampak positif terhadap kualitas udara adalah semakin berkurangnya tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor. Permasalahan yang dapat terjadi adalah dari pola pergerakan kendaraan yang semakin merata di seluruh wilayah Metro, dengan adanya akses-akses baru, sehingga pola distribusi pencemaran juga akan semakin menyebar. Kondisi ini harus diikuti dengan aplikasi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan pemberlakuan baku mutu emisi gas buang yang lebih ketat, yang sebenarnya sangat memungkinkan karena teknologi motor bakar ramah lingkungan dan alat pereduksi polutan gas buang telah diaplikasikan, sehingga beban emisi dapat dikurangi.

Kecenderungan ke depan adalah peningkatan potensi emisi pencemar udara dari sektor domestik akan semakin bertambah seiring dengan pertambahan jumlah rumah tangga. Pola penggunaan bahan bakar LPG dan minyak tanah memberikan kontributor utama terhadap tingkat pencemaran udara. Diupayakan agar ke depan pemakaian LPG atau energi listrik untuk rumah tangga dapat terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, karena lebih ramah lingkungan. Namun untuk beberapa tahun ke depan dengan meningkatnya harga elpiji dan premium, kecenderungan intensifikasi pemakaian minyak tanah diprediksi akan meningkat.

Kualitas udara di Metro Bandung akan menjadi sumber daya penting mengingat kondisi geografis wilayahnya yang berada di suatu Cekungan, dimana potensi akumulasi polutan dan laju akan jauh lebih cepat, pola arah dan kecepatan angin Timur Barat juga akan cenderung mendistribusikan polutan pada dua sisi celah cekungan yaitu arah Timur Barat. Kondisi meteorologi di wilayah ini akan sangat menentukan keluar, masuk, atau terakumulasinya polutan. Curah hujan yang cukup tinggi sebenarnya membantu proses pembersihan udara (deposisi basah), sehingga fungsi–fungsi kawasan lindung yang mampu menjaga iklim mikro wilayah sangat perlu untuk dipertahankan. Fungsi kawasan hijau, baik hutan lindung, hutan kota, ruang terbuka hijau, disamping berfungsi untuk resapan air juga berfungsi sebagai penyerap berbagai polutan di udara, dan produsen oksigen utama. Kestabilan kota secara ekologi sangat penting, sama pentingnya dengan nilai kestabilannya secara ekonomi. Hijainya kota tidak hanya menjadikan kota itu indah dan sejuk namun aspek kelestarian, keserasian, keselarasan dan keseimbangan sumberdaya alam, yang pada giliran selanjutnya akan membaktikan jasa-jasa berupa kenyamanan, kesegaran, terbebasnya kota dari polusi dan kebisingan serta sehatnya warga kota.

3.6 Resume

a. Sosial-ekonomi

Pertumbuhan penduduk wilayah metropolitan Bandung rata-rata 2,7 % per tahun dengan tingkat pertumbuhan tertinggi berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya sekitar 3,7 %. Dengan asumsi bahwa sampai dengan tahun 2025 belum ada upaya pengendalian mobilitas penduduk secara efektif maka laju pertumbuhan penduduk akan tetap tumbuh rata-rata 2,86 % atau 14,67 Juta Jiwa pada tahun 2025. Dari perkiraan jumlah penduduk tersebut maka 70 % atau sekitar 10 Juta merupakan penduduk perkotaan yang bermukim disekitar wilayah Kota Bandung seperti Kota Cimahi, Padalarang dan Rancaekek yang merupakan wilayah pelimpahan arus urbanisasi ke kota Bandung.

Tabel 3.12
Perkiraan Distribusi Jumlah Penduduk Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2025

No	Zona	Kawasan Perkotaan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk Kaw. Perkotaan	Kepadatan (jiwa/Ha)
1	Zona Bandung	Kota Bandung Kota Cimahi	23.248,0	3 Juta 750.000	161,30
2	Zona Padalarang	Padalarang	46.565,6	500.000	10,74
3	Zona Rancaekek	Rancaekek Majalaya	27.787,3	300.000 400.000	25,19
4	Zona Soreang	Soreang Banjaran	34.186,7	250.000 350.000	17,55
5	Zona Jatinangor	Jatinangor	13.466,3	200.000	14,85
6	Zona Lembang	Kota Lembang	46.023,1	100.000	2,17
7	Zona Gunung Halu-Ciwidey	Ciwidey	155.909,0	75.000	0,48

Sumber : Hasil Analisis Bapeda, 2005.

Bertitik tolak dari perkiraan laju pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi khususnya di wilayah perkotaan dan distribusi penyebarannya yang tidak merata mengarah perlu upaya penanganan yang lebih serius terhadap upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta penyebarannya baik melalui mekanisme administratif maupun mekanisme non-administratif.

Dari aspek perekonomian pertumbuhan ekonomi diwilayah Metropolitan Bandung secara umum dapat dikelompokkan sektor dominan diwilayah Kota Bandung –Kota Cimahi dan di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Di wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi perkembangan sektor ekonomi didorong oleh perkembangan sektor industri manufaktur sebesar 8,72 % per tahun dengan kontribusi sebesar 27,2 % terhadap PDRB atas dasar harga konstan sedangkan sektor jasa dan perdagangan tumbuh dengan laju 19,24 % dengan kontribusi sekitar 33 %. Untuk Wilayah Kabupaten Bandung sektor dominan yang berkembang diarah ini adalah sektor Industri Pengolahan yang tumbuh dengan laju rata-rata sebesar 9,11 % dengan kontribusi sebesar 51,8 % terhadap PDRB atas dasar harga konstan sedangkan sektor perdagangan tumbuh sebesar 3,4 % dengan kontribusi sebesar 14,8 % dan sektor pertanian tumbuh dengan laju 0,49 % per tahun dengan kontribusi sebesar 10,3 % atas dasar harga konstan.

Berdasarkan hasil perhitungan Locational Quotion (LQ) didapat bahwa sektor-sektor basis yang menjadi tulang punggung perekonomian diwilayah Metropolitan, adalah :

1. Industri Pengolahan
2. Listrik, Gas dan air bersih;
3. Bangunan/Konstruksi
4. Perdagangan, Hotel dan restoran
5. Pengangkutan dan Komunikasi;
6. Keuangan persewaan dan jasa perusahaan
7. Jasa-jasa lainnya

Dengan teridentifikasinya ke-7 sektor basis diatas yang pada umumnya adalah sektor-sektor perkotaan (sektor sekunder dan tersier) maka kecenderungan perkembangan wilayah metropolitan sampai dengan tahun 2025 cenderung berkembang kearah sektor perkotaan. Sektor perkotaan yang diperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan adalah sektor industri manufaktur akibat diterapkannya AFTA dan kebijakan internal yang memperketat perijinan lokasi industri yang tidak sesuai dengan daya dukungnya. Sektor pertanian yang sifatnya produksi diwilayah diperkirakan akan tumbuh konstan sampai dengan tahun 2025 namun kecenderungan perkembangan pertanian yang sifatnya agribisnis diperkirakan akan tetap tumbuh lebih tinggi lagi. Demikian pula dengan sektor Jasa Pariwisata diperkirakan akan tetap berkembang dengan pesat.

b. Infrastruktur

Pengembangan sistem transportasi sebagai elemen pembentuk ruang dan keterhubungan untuk wilayah Metropolitan Bandung sampai dengan tahun 2005 perlu diarahkan dalam membentuk keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah metropolitan, pengembangan jaringan transportasi tersebut merupakan salah satu kunci dari perwujudan struktur Metropolitan Bandung yang direncanakan. Salah satu strategi yang perlu dilakukan dalam pengembangan sistem transportasi Metropolitan Bandung adalah pengembangan sistem angkutan masal terpadu (Mass Rapid Transport System) khususnya di wilayah inti Metropolitan Bandung. Kebijaksanaan ini sangat penting dalam kerangka mengurangi terjadinya kemacetan di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Penyediaan infrastruktur drainase yang terintegrasi merupakan salah satu kebutuhan dalam mendukung pengembangan pembangunan terutama dari kemungkinan terjadinya ancaman banjir.

c. Daya dukung

Kondisi daya dukung lingkungan di cekungan Bandung, saat ini kondisinya sudah sangat kritis menjadi factor pembatas bagi pengembangan pembangunan di Wilayah

Metropolitan Bandung kedepan. Walaupun dengan asumsi terjadi upaya penanganan dan rehabilitasi lingkungan secara terpadu, namun upaya pemulihan terhadap perbaikan kondisi lingkungan ini akan memerlukan waktu yang relatif cukup lama. Oleh karena itu maka arah pengembangan pembangunan di wilayah Metropolitan Bandung kedepan tetap harus diarahkan pada lokasi-lokasi yang mempunyai kondisi daya dukung yang sesuai, memasukan sentuhan-sentuhan teknologi serta upaya penegakan hukum lingkungan. Pemulihan daya dukung terutama diarahkan pada upaya pemulihan DAS Citarum beserta ke-11 Sub DASnya, upaya rehabilitasi terhadap kawasan-kawasan resapan air dan pemulihan terhadap pencemaran udara diperkotaan melalui pembatasan angkutan pribadi dan menyediakan angkutan masal terpadu serta pengendalian pencemaran limbah udara dari kegiatan Industri yang saat ini masih ada.

d. Kecenderungan arah Pengembangan

Dari evaluasi terhadap struktur pengembangan kawasan yang telah direkomendasikan MBUDP menunjukan struktur tersebut tidak sepenuhnya terbentuk, pembentukan kota-kota satelit di sekitar Kota Bandung tidak berjalan dengan efektif karena masih kuatnya peranan Kota Bandung, belum terwujudnya pengembangan infrastruktur dan fasilitas utama ke kota-kota di sekitar wilayah inti, belum efektifnya mekanisme pengendalian pembangunan, terbatasnya kemampuan pembiayaan serta belum optimalnya koordinasi. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadi pembangunan yang tetap terkonsentrasi di sekitar wilayah inti Kota Bandung, pengembangan permukiman mengikuti pola jaringan jalan utama (ribon development) serta pengembangan permukiman disekitar pinggiran Kota Bandung dan Cimahi bersifat tidak terintegrasi (sprawl development) yang mengakibatkan tidak efisien penyediaan infrastruktur dan fasilitas serta semakin mendorong terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perkotaan.

Bertitik tolak dari pertimbangan diatas maka arah pengembangan struktur pengembangan Metropolitan Bandung sampai dengan 2005, seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek berikut :

1. Pengembangan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang berbasis daya dukung yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan dan permukiman tidak kearah kawasan konservasi;
2. Pengembangan ekonomi di wilayah Metropolitan Bandung diarahkan pada kegiatan yang capital intensif bukan pada kegiatan ekonomi yang labour intensif dengan memperhitungkan perbandingan antara nilai tambah ekonomi yang tinggi dan beban biaya lingkungan yang harus ditanggung;
3. Pengembangan sistem transportasi diarahkan dalam rangka memperkuat aksesibilitas Barat-Timur-Selatan secara integral dengan bertumpu pada penyediaan sistem angkutan masal;
4. Penyebaran fungsi kota dari zona inti ke pusat-pusat zona perlu didorong melalui pelibatan peran serta dunia usaha dan masyarakat melalui penyediaan sistem insentif dan dis-insentif;
5. Mendorong tumbuhnya pembangunan perkotaan yang polisentrik yang didukung dengan penyediaan sistem transportasi guna mengurangi panjang perjalanan;